

# Kajian Stakeholders dalam Pengembangan Kampung Wisata Warna-Warni Berkelanjutan dan Aman Bencana di Bantaran Sungai Brantas

Kevie Desderius<sup>✉1</sup>, Arief Hargono<sup>2</sup>, Aditya Prana Iswara<sup>3</sup>

<sup>1,3</sup> Magister Manajemen Bencana, Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga, Surabaya

<sup>2</sup> Magister Epidemiologi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga, Surabaya

Diunggah: 06/08/25 | Direview: 16/12/25 | Diterima: 29/11/25

✉ [kevie.desderius-2023@pasca.unair.ac.id](mailto:kevie.desderius-2023@pasca.unair.ac.id) ; <sup>2</sup> [arief.hargono@fkm.unair.ac.id](mailto:arief.hargono@fkm.unair.ac.id) ; <sup>3</sup> [aditya.prana@pasca.unair.ac.id](mailto:aditya.prana@pasca.unair.ac.id) ;

**Abstrak:** Kampung Wisata Warna-Warni di Kota Malang adalah salah satu destinasi pariwisata yang berada di Bantaran Sungai Brantas. Sebagai daya tarik wisata yang rentan terhadap ancaman bencana hidrometeorologi, pengembangan kawasan ini memerlukan sinergi antar aktor. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi stakeholders yang terlibat, peran, hubungan, serta merumuskan strategi pengembangan berbasis kolaborasi. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi, yang kemudian dianalisis menggunakan matriks kepentingan-pengaruh (Interest-Power Matrix) dan klasifikasi peran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kawasan melibatkan lima unsur Pentahelix: Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah, dan Media. Namun, dominasi peran masih berpusat pada Pemerintah dan Komunitas (Pokdarwis). Ditemukan potensi konflik kepentingan antara fungsi ekonomi wisata dan fungsi lindung sempadan sungai. Oleh karena itu, strategi optimal yang dirumuskan adalah penguatan kolaborasi Pentahelix melalui pelebagaan forum lintas sektor yang menempatkan pemerintah sebagai koordinator kebijakan dan komunitas sebagai implementator, didukung oleh akademisi dan media untuk mitigasi risiko bencana yang berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Pemetaan Stakeholders ; Kampung Wisata ; Kota Malang ; Aman Bencana ; Bantaran Sungai.

*Stakeholder Study in the Development of Sustainable and Disaster-Safe Colorful Tourism Villages on the Banks of the Brantas River*

**Abstract:** The Colourful Tourism Village in Malang City is one of the tourist destinations located on the banks of the Brantas River. As a tourist attraction that is vulnerable to hydrometeorological disasters, the development of this area requires synergy between actors. The purpose of this study is to identify the stakeholders involved, their roles and relationships, and to formulate a collaborative development strategy. The research method used a qualitative descriptive approach. Data collection was conducted through observation, in-depth interviews, and documentation studies, which were then analysed using an interest-power matrix and role classification. The results showed that the development of the area involved five elements of the Pentahelix: academia, business, community, government, and media. However, the dominant roles are still centred on the Government and Community (Pokdarwis). A potential conflict of interest was found between the economic function of tourism and the protective function of river boundaries. Therefore, the optimal strategy formulated is to strengthen Pentahelix collaboration through the institutionalisation of a cross-sector forum that places the government as the policy coordinator and the community as the implementer, supported by academics and the media for sustainable disaster risk mitigation.

**Keywords:** Stakeholder Mapping; Tourism Village; Malang City; Disaster Safety; Riverbanks

## 1. Latar Belakang

Perkembangan pembangunan kota saat ini, pemanfaatan tanah dan ruang di kawasan sempadan sungai tidak sesuai dengan peruntukan fungsi ruang sempadan sungai. Pelanggaran peruntukan ruang pada sempadan sungai banyak terjadi di Indonesia (Turnip et.al, 2022). Pelanggaran ini berupa terbentuknya permukiman-permukiman kumuh yang hampir dihadapi oleh semua kota-kota besar di Indonesia. Permukiman kumuh timbul sebagai akibat pesatnya pemusatan kegiatan di kota-kota besar yang berdampak pada urbanisasi (Zubaidah & Kurniawan, 2022). Salah satu kota yang mengalami permasalahan pemanfaatan sempadan sungai menjadi permukiman kumuh adalah Kota Malang. Merujuk kepada data BPS Kota Malang terbaru tahun 2023, Kota Malang memiliki kepadatan 7627 jiwa/km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk totalnya 847.182 jiwa yang tersebar di lima kecamatan (BPS Kota Malang, 2024).

Merujuk kepada dokumen SK Walikota Malang Nomor 86 Tahun 2015 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh Kota Malang yang dikutip dalam penelitian Kusumawardhani, Rachmawati dan Sutikno (2022), diketahui bahwa sebesar 608 Ha atau sekitar 5% termasuk kedalam kawasan kumuh (Akbar, 2018). Lokasi sebaran permukiman kumuh di Kota Malang didominasi pada area sempadan sungai dan sempadan rel kereta api. Salah satu upaya penyelesaian permasalahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang adalah melalui program kampung tematik. Kampung Warna-Warni Jodipan adalah kampung kumuh pertama di sempadan Sungai Brantas Kota Malang yang dijadikan percontohan program kampung tematik pada tahun 2016 (Akbar, 2018).

Kampung Warna-Warni di Bantaran Sungai Brantas adalah salah satu daya tarik unggulan di Kota Malang. Amanat dalam dokumen penataan ruang wilayah yaitu Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2022 – 2042 mengamanatkan pembangunan Kota Malang sebagai sebuah Kota Pendidikan dan Jasa berkualitas dan skala nasional dengan salah satunya melalui pengembangan ekonomi pariwisata berbasis kampung tematik. Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan perlu melakukan melibatkan pada stakeholders terkait guna memberikan dampak jangka panjang dalam aspek ekonomi, ekologi dan sosial (Destiana et.al, 2020). Hubungan dan koordinasi yang baik antar stakeholders dalam suatu daya tarik wisata dapat menunjang daya saing jangka panjang serta pengembangan destinasi wisata yang berkelanjutan (Masrurun & Nastiti, 2023).

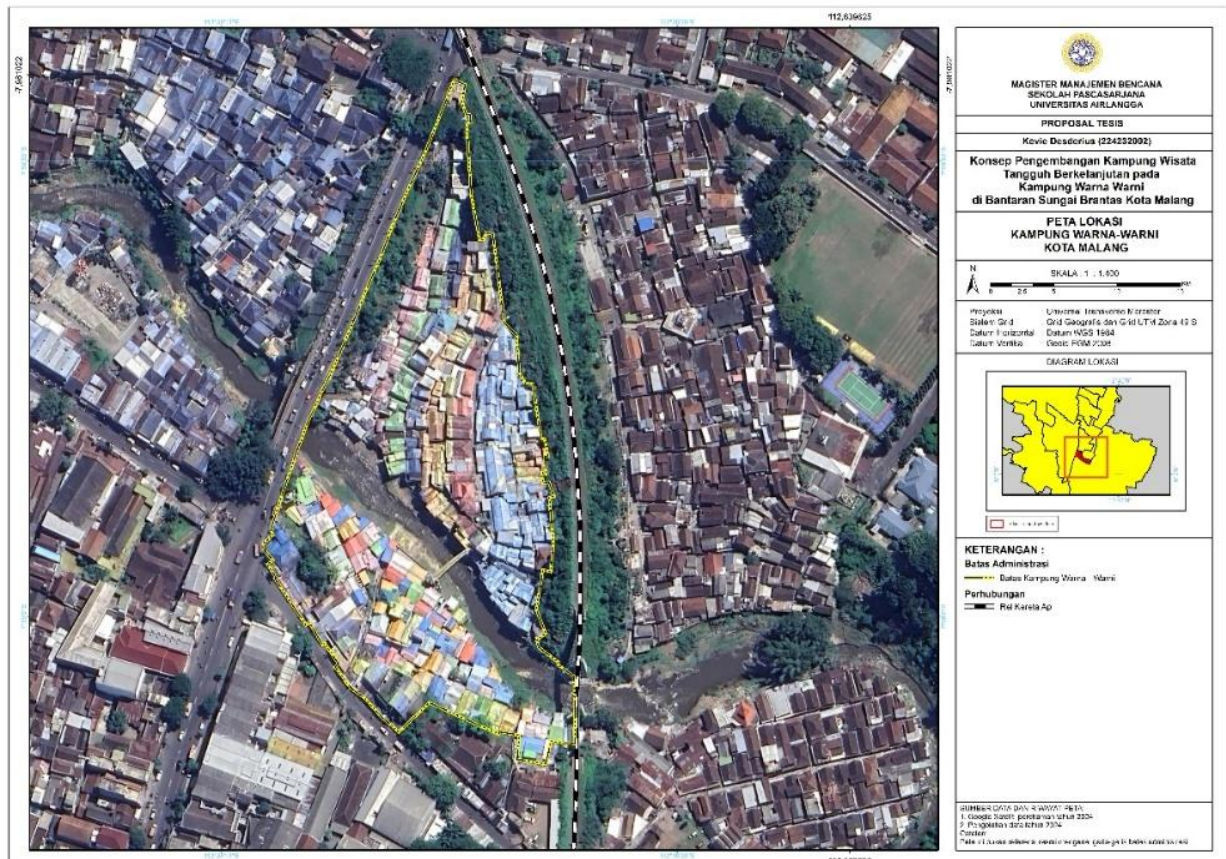
Stakeholders dalam pengembangan Kampung Wisata Warna-Warni berkaitan dengan aktor-aktor penting yang terlibat secara langsung dan tidak langsung. Stakeholders dapat berupa sebuah organisasi, komunitas, kelompok masyarakat, pemerintah atau kelembagaan lain dengan berbagai kepentingan yang berbeda antar stakeholders (Masrurun & Nastiti, 2023). Dengan berbagai kepentingan antar stakeholders maka biasanya akan terjadi suatu kolaborasi. Kolaborasi antar stakeholder terkait dengan bentuk kerjasama dan interaksi antar pemangku kepentingan dengan peran dalam pengambilan kebijakan dan aktor dalam pengembangan pada kampung wisata (Chrismawati & Pramono, 2021). Pemetaan stakeholders analisis digunakan untuk upaya mengidentifikasi stakeholders yang memiliki pengaruh sehingga dapat diketahui peran, kepentingan dan pengaruh antar stakeholders (Rohman & Fitriana, 2024).

Guna mengurai kompleksitas kepentingan dalam pengembangan pariwisata di kawasan rawan bencana, pendekatan Pentahelix menjadi relevan. Konsep Pentahelix merupakan pengembangan dari model Triple Helix yang melibatkan lima unsur utama: Pemerintah (*Government*), Akademisi (*Academics*), Pelaku Usaha (*Business*), Masyarakat/Komunitas (*Community*), dan Media (*Media*) (Kelvin et.al., 2022). Dalam konteks pariwisata berkelanjutan, sinergi kelima aktor ini krusial untuk memastikan bahwa aspek ekonomi tidak mengorbankan aspek keselamatan dan lingkungan (Khater et.al., 2024). Pemerintah berperan sebagai regulator dan kontrol (*political power*), akademisi sebagai konseptor (*knowledge power*), pebisnis sebagai enabler (*capital power*), komunitas sebagai akselerator (*social power*), dan media sebagai pendorong (*catalyst power*) (Monnapula-Mapesela, 2024). Optimalisasi peran Pentahelix ini diharapkan dapat meminimalisir konflik pemanfaatan ruang di sempadan sungai dan meningkatkan ketangguhan bencana kawasan wisata. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memetakan stakeholders analisis dalam pengembangan Kampung Wisata Warna-Warni yang aman bencana di Bantaran Sungai Brantas Kota Malang.

## 2. Metode

### 2.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Wisata Warna-Warni yang terletak di bantaran Sungai Brantas, Kota Malang. Kawasan kampung wisata ini terdiri dari dua kampung yaitu Kampung Tridi dan Kampung Jodipan. Kampung Tridi berada di Kelurahan Kesatrian, Kecamatan Blimbing, sedangkan Kampung Jodipan berada di Kelurahan Jodipan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Kawasan ini awalnya merupakan perkampungan kumuh yang sejak tahun 2016 dikembangkan menjadi kampung wisata dengan tujuan menghilangkan kekumuhan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Pengelolaan kawasan dilakukan oleh masing-masing Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).



Gambar 1. Lokasi Penelitian : Kampung Wisata Warna-Warni di Bantaran Sungai Brantas, Kota Malang, Jawa Timur

### 2.2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut I Made Winartha (2006), metode deskriptif kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berfokus pada analisis, penggambaran, dan peringkasan kondisi serta situasi berdasarkan berbagai sumber data yang dikumpulkan dari lapangan. Pendekatan kualitatif ini bertujuan memperoleh gambaran yang mendalam dan detail mengenai permasalahan yang muncul di lokasi penelitian. Selain pengumpulan data lapangan, penelitian ini juga menggunakan studi literatur sebagai basis untuk mengkaji literatur terdahulu yang relevan guna memperkuat pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti (Lindawati, S., & Hendri, M. 2016; Maulana et.al, 2024; Wakka, 2014).

### 2.3. Jenis Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang meliputi deskripsi berupa kata-kata, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan fenomena lainnya yang terjadi secara alamiah di lapangan (Andini et.al., 2022). Sumber data utama adalah data primer yang diperoleh melalui observasi langsung di lokasi penelitian serta dokumentasi. Data sekunder berasal dari studi pustaka yang mencakup dokumen-dokumen terkait lokasi penelitian, serta literatur dan penelitian terdahulu yang mendukung analisis dan pembahasan.

### 2.4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi Aktor: Menginventarisasi seluruh aktor yang terlibat berdasarkan unsur Pentahelix (ABCGM) (Riyanto & Alfirdaus, 2024).
2. Klasifikasi Kepentingan dan Pengaruh: Untuk mengurangi subjektivitas, klasifikasi stakeholder didasarkan pada indikator operasional yang diadopsi dari kerangka Reed et al. (2009) dan Bryson (2004) (Samani et.al., 2023):
  - Power (Kekuatan/Pengaruh): Diukur berdasarkan: (a) Kewenangan legal/regulasi, (b) Kontrol terhadap sumber daya (anggaran/aset), dan (c) Kemampuan memobilisasi massa.
  - Interest (Kepentingan): Diukur berdasarkan: (a) Ketergantungan ekonomi/sosial terhadap kawasan, (b) Dampak langsung aktivitas kawasan terhadap aktor, dan (c) Prioritas program kerja lembaga.
3. Pemetaan Matriks: Berdasarkan indikator di atas, stakeholders dipetakan ke dalam kuadran: (1) Players (Key Players), (2) Subjects, (3) Context Setters, dan (4) Crowd (Sartika & Yogopriatno, 2024).
4. Analisis Peran: Peran stakeholders dikategorikan secara spesifik menggunakan indikator berikut:
  - Policy Creator: Pihak yang memiliki otoritas menerbitkan SK, Perda, atau regulasi mengikat.
  - Coordinator: Pihak yang memiliki fungsi menghubungkan antar instansi/sector.
  - Implementor: Pihak yang melakukan eksekusi teknis atau operasional di lapangan.
  - Fasilitator: Pihak yang menyediakan sarana, pendampingan, atau mediasi.
  - Akselerator: Pihak yang mempercepat proses melalui promosi, investasi, atau inovasi.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kampung Waran-Warni di Bantaran Sungai Brantas Kota Malang pada mulanya merupakan sebuah kawasan permukiman kumuh masyarakat. Kondisi kekumuhan permukiman masyarakat tersebut karena perkampungan yang berada di bantaran Sungai dan jauh dari tempat pembuangan sampah (TPS) sehingga masyarakat memiliki kebiasaan pembuangan sampah sembarang ke aliran Sungai. Perubahan kawasan permukiman kumuh menjadi pariwisata diinisiasi oleh Komunitas GuysPro dari Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Malang (Maulana et.al, 2024). Inisiatif yang dilakukan oleh para mahasiswa merupakan respons terhadap kondisi kampung yang kumuh dan minim perhatian. Mahasiswa melihat adanya potensi tersembunyi dalam perkampungan dengan jalan sempit dan bangunan tua serta budaya gotongroyong yang masih terjaga sehingga mahasiswa melakukan inisiasi melakukan pengecatan Kampung Jodipan dan Kampung Tridi menjadi Kampung Warna-Warni. Upaya mahasiswa menghasilkan visualisasi kampung yang menarik dan karya seni yang menghiasi setiap sudut kampung serta menumbuhkan pemberdayaan masyarakat (Topandean, 2022). Dalam pengembangan Kawasan Kampung Wisata Warna-Warni yang terdiri atas 2 kampung perlu memperhatikan aspek kepariwisataan, aspek tata kelola sungai, aspek tata kelola permukiman dan aspek tata kelola bencana pada kawasan tersebut.

### 3.2. Identifikasi Stakeholders

Stakeholders adalah semua pihak baik yang secara individu maupun kelompok yang dapat dipengaruhi dan/atau memengaruhi pengambilan keputusan serta pencapaian tujuan suatu kegiatan (Wakka, 2014). Penanganan

bencana di Kota Malang, khususnya di wilayah bantaran Sungai Brantas, melibatkan berbagai lembaga dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang berbeda namun saling terkait. Pemahaman terhadap tupoksi masing-masing lembaga ini penting untuk menciptakan koordinasi yang efektif dalam pengembangan Kampung Wisata Warna-Warni yang aman bencana. Berdasarkan hasil observasi, studi kepustakaan dan wawancara dengan beberapa informan terdapat beberapa stakeholder yang berkaitan erat dalam upaya pengembangan Kawasan Kampung Warna-Warni di Kota Malang. Berikut adalah hasil identifikasi pihak-pihak terkait dalam pengembangan Kampung Warna-Warni Kota Malang :

Dalam penelitian ini maka terdapat beberapa perguruan tinggi dan akademisi terkait yang diidentifikasi oleh peneliti yaitu :

1. BBWS Brantas (Kementerian PUPR): Bertugas mengelola sumber daya air di Wilayah Sungai (WS) Brantas. Pengelolaan ini meliputi pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air di kawasan tersebut.
2. BPDASHL Brantas (Kementerian Kehutanan): Berfungsi dalam tata kelola Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas, yang mencakup perencanaan, rehabilitasi, konservasi air, pengendalian kerusakan, dan evaluasi pengelolaan DAS. Mereka berupaya menjaga keseimbangan ekosistem DAS.
3. Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang: Memiliki kewenangan dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kota Malang. Ini termasuk pengelolaan lingkungan hidup di Kawasan Kampung Warna-Warni.
4. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang: Berwenang mengelola Kawasan Kampung Warna-Warni sebagai salah satu daya tarik pariwisata Kota Malang. Mereka bertanggung jawab dalam mengembangkan potensi wisata daerah.
5. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang: Memiliki kewenangan dalam pengelolaan penataan ruang dan kawasan permukiman masyarakat. Hal ini termasuk pada Kawasan Kampung Warna-Warni Kota Malang.
6. BPBD Kota Malang: Berwenang mengelola dan menanggulangi bencana yang terjadi di Kota Malang. Hal ini mencakup tata kelola bencana di Kawasan Kampung Warna-Warni.
7. Bappeda Kota Malang: Berwenang merencanakan pembangunan daerah dan integrasi perencanaan pembangunan sektoral. Ini dilakukan untuk mendukung pengembangan Kawasan Kampung Warna-Warni Kota Malang.
8. Dinas Kesehatan Kota Malang: Memiliki kewenangan dalam bidang kesehatan, termasuk pengelolaan ancaman bencana kesehatan. Mereka berperan dalam pengembangan Kawasan Kampung Warna-Warni Kota Malang.
9. UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang: Berwenang dalam bidang pertolongan dan pemadaman kebakaran di Kota Malang. Tugas ini termasuk pada permukiman padat penduduk Kawasan Kampung Warna-Warni Kota Malang.
10. Kelurahan Jodipan dan Kelurahan Satriyan: Sebagai pemerintah kelurahan, mereka berwenang dalam pengembangan wilayah kelurahan. Kawasan Kampung Warna-Warni Kota Malang berada di dua kelurahan ini.
11. Pokdarwis Kampung Tridi dan Pokdarwis Kampung Jodipan: Mengelola pariwisata berbasis masyarakat di Kawasan Kampung Warna-Warni Kota Malang. Mereka memiliki kepentingan dan kewenangan dalam pengembangan kawasan kampung tersebut.
12. Ketua RT dan Ketua RW Kampung Tridi dan Kampung Jodipan: Ketua RT berperan sebagai penggerak utama dalam mengorganisir masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan kampung wisata. Ketua RW mengkoordinasikan kegiatan antar RT dalam satu wilayah.
13. Perguruan Tinggi: Mendukung pengembangan Kawasan Kampung Warna-Warni Kota Malang melalui ide dan gagasan keilmuan. Perguruan tinggi berperan penting dan strategis sebagai tempat bernaungnya para akademisi.

14. Media: Memiliki peran penting dalam publikasi dan promosi Kampung Warna-Warni. Melalui pemberitaan dan konten kreatif, media dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan menarik wisatawan.
15. Sektor Swasta: Dapat mendukung pengembangan Kampung Warna-Warni melalui investasi, inovasi, dan pengembangan produk wisata. Keterlibatan sektor swasta dapat meningkatkan kualitas dan daya saing destinasi wisata.

### 3.3. Klasifikasi Stakeholders

Dalam pendapat Moore dalam Anggara (2014) dan Napitupulu (2020) bahwa stakeholders yang terlibat dalam suatu kebijakan terbagi atas tiga unsur yaitu state atau pemerintah, unsur privat atau swasta dan unsur masyarakat (society) (Fila & Alfirdaus, 2020; Napitupulu, 2020). Stakeholders dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori: 1. Primer: Stakeholders yang memiliki pengaruh dan tingkat kepentingan yang tinggi; untuk melibatkan kategori ini, perlu dilakukan kemitraan. 2. Sekunder: Stakeholders yang memiliki pengaruh tinggi tetapi tingkat kepentingan rendah; untuk melibatkan kategori ini, pendekatan yang digunakan adalah konsultasi. 3. Tersier: Stakeholders dengan pengaruh rendah namun kepentingan tinggi; untuk melibatkan mereka, cara yang digunakan adalah memberikan informasi. 4. Kwartir: Stakeholders yang memiliki pengaruh dan kepentingan rendah; untuk melibatkan kategori ini, diperlukan control (Napitupulu, 2020). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka klasifikasi stakeholder yang terlibat dalam pengembangan Kampung Warna-Warni sebagai daya tarik pariwisata berkelanjutan dan aman bencana di Sempadan Sungai Brantas Kota Malang adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Klasifikasi Stakeholders

No	Unsur Stakeholders	Stakeholders	Klasifikasi
1	Pemerintah	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang	Primer
		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang	
		BPBD Kota Malang	
		BBWS Brantas (Kementerian PUPR)	Sekunder
		Bappeda Kota Malang	
		Kelurahan Jodipan dan Kelurahan Satriyan	Tersier
		Dinas Kesehatan Kota Malang	
		UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang	
		BPDASHL Brantas (Kementerian Kehutanan)	Kwartir
		Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang	
2	Privat (Swasta)	Perguruan Tinggi Negeri	
		Media	Sekunder
		Perguruan Tinggi Swasta	Kwartir
3	Society (Masyarakat)	Sektor Swasta	
		Pokdarwis Kampung Tridi dan Pokdarwis Kampung Jodipan	Primer
		Ketua RT dan Ketua RW Kampung Tridi dan Kampung Jodipan	

#### 1. Klasifikasi Primer

Klasifikasi primer adalah stakeholders yang memiliki pengaruh dan tingkat kepentingan yang tinggi; untuk melibatkan kategori ini, perlu dilakukan kemitraan. Dalam klasifikasi ini, terdapat:

- a. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang
  - b. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang
  - c. BPBD Kota Malang
  - d. Pokdarwis Kampung Tridi dan Pokdarwis Kampung Jodipan
  - e. Ketua RT dan Ketua RW Kampung Tridi dan Kampung Jodipan
2. Klasifikasi Sekunder  
 Klasifikasi sekunder adalah stakeholders yang memiliki pengaruh tinggi tetapi tingkat kepentingan rendah; untuk melibatkan kategori ini, pendekatan yang digunakan adalah konsultasi. Dalam klasifikasi ini, terdapat:
  - a. BBWS Brantas (Kementerian PUPR)
  - b. Bappeda Kota Malang
  - c. Media
3. Klasifikasi Tersier  
 Klasifikasi tersier adalah stakeholders dengan pengaruh rendah namun kepentingan tinggi; untuk melibatkan mereka, cara yang digunakan adalah memberikan informasi. Dalam klasifikasi ini, terdapat:
  - a. Kelurahan Jodipan dan Kelurahan Satriyan
  - b. Dinas Kesehatan Kota Malang
  - c. UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang
4. Klasifikasi Kwartir  
 Klasifikasi kwartir adalah stakeholders yang memiliki pengaruh dan kepentingan rendah dan berfungsi sebagai kontrol. Dalam klasifikasi ini, terdapat:
  - a. BPDASHL Brantas (Kementerian Kehutanan)
  - b. Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang
  - c. Perguruan Tinggi
  - d. Sektor Swasta

### 3.4. Struktur Hierarki Stakeholder

Dalam struktur pengelolaan Kampung Wisata Warna-Warni, terdapat hierarki pengambilan keputusan dan implementasi sebagai berikut:

1. Tingkat Kebijakan Strategis: Meliputi lembaga-lembaga dengan kewenangan penetapan kebijakan dan regulasi seperti Bappeda Kota Malang, BBWS Brantas, dan BPBD Kota Malang. Lembaga-lembaga ini membuat keputusan strategis terkait pengembangan kawasan yang mempengaruhi seluruh stakeholders lainnya.
2. Tingkat Koordinasi Teknis: Meliputi dinas-dinas teknis seperti Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Dinas PUPR-Perkim, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Kesehatan. Lembaga-lembaga ini menerjemahkan kebijakan strategis menjadi program dan kegiatan teknis.
3. Tingkat Implementasi Lokal: Meliputi pemerintah kelurahan, Pokdarwis, RT/RW, dan masyarakat lokal. Stakeholders ini berperan dalam implementasi program dan kegiatan di lapangan serta menjadi ujung tombak pengelolaan kampung wisata.
4. Tingkat Pendukung: Meliputi perguruan tinggi, media, dan sektor swasta yang berperan dalam pengembangan kapasitas, inovasi, promosi, dan dukungan finansial.

Dalam hierarki ini, terdapat alur koordinasi vertikal dan horizontal. Koordinasi vertikal terjadi antara lembaga pada tingkat yang berbeda yaitu lembaga dengan kewenangan di tingkat pusat dan daerah misalnya BBWS Brantas dengan Bappeda Kota Malang. Koordinasi horizontal terjadi antara lembaga pada tingkat yang sama, misalnya antara BPBD dengan Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

### 3.5. Pemetaan Stakeholder

Stakeholders dalam tata kelola pengembangan Kawasan Kampung Warna – Warni sebagai daya tarik pariwisata yang berkelanjutan dan aman bencana di Sempadan Sungai Brantas Kota Malang memiliki kepentingan (intrest)



serta pengaruh (power) yang berbeda-beda. Pemetaan stakeholders akan membantu pengelola bagaimana melibatkan stakeholders tersebut dalam pencapaian tujuan (Wakka, 2014). Stakeholders dalam pengembangan kawasan kampung tersebut menurut Thompson bahwa peran stakeholders dalam pelaksanaan sebuah kebijakan pengembangan dibedakan menjadi empat jenis (Wakka, 2014; Handayani & Warsono, 2017) yaitu :

1. Aktor yang memiliki tingkat kepentingan tinggi namun kekuatan rendah dikategorikan sebagai subjek. Meskipun kapasitas mereka dalam mencapai tujuan relatif rendah, mereka dapat berpengaruh dengan menjalin aliansi dengan aktor lain. Oleh karena itu, penting untuk menjaga hubungan baik dengan aktor ini karena mereka sering kali dapat memberikan bantuan yang signifikan.
2. Aktor yang memiliki tingkat kepentingan dan kekuatan tinggi diklasifikasikan sebagai pemain kunci. Aktor-aktor ini perlu dilibatkan secara aktif dan penuh, termasuk dalam proses evaluasi strategi baru.
3. Aktor dengan tingkat kepentingan dan kekuatan rendah disebut sebagai pengikut lain. Untuk melibatkan mereka lebih jauh, perlu diperhatikan bahwa kepentingan dan pengaruh mereka dapat berubah seiring waktu. Oleh karena itu, aktor ini harus terus dipantau dan dijalin komunikasi yang baik.
4. Aktor yang memiliki tingkat kepentingan rendah tetapi kekuatan tinggi dikategorikan sebagai pendukung. Keberadaan mereka bisa membawa risiko, sehingga perlu dilakukan pemantauan dan pengelolaan yang hati-hati. Mereka juga bisa berubah menjadi pemain kunci akibat suatu peristiwa, sehingga hubungan baik dengan stakeholder ini harus terus dipelihara.



Gambar 2. Pemetaan Stakeholders Berdasarkan Pengaruh dan Kepentingan  
Sumber : Hasil Analisis, 2025

Berikut adalah pemetaan stakeholders berdasarkan pengaruh dan kepentingan dalam pengembangan kampung wisata warna-warni sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan dan aman bencana di Bantaran Sungai Brantas, Kota Malang didapatkan hasil klasifikasi sebagai berikut :

1. Subjek (Kepentingan Tinggi, Kekuatan Rendah)  
Aktor yang memiliki tingkat kepentingan tinggi namun kekuatan rendah dikategorikan sebagai subjek. Meskipun kapasitas mereka dalam mencapai tujuan relatif rendah, mereka dapat berpengaruh dengan menjalin aliansi dengan aktor lain. Oleh karena itu, penting untuk menjaga hubungan baik dengan aktor ini karena mereka sering kali dapat memberikan bantuan yang signifikan.



- a. Kelurahan Jodipan dan Kelurahan Satriyan
  - b. Dinas Kesehatan Kota Malang
  - c. UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang
2. Pemain Kunci (Kepentingan dan Kekuatan Tinggi)
 

Aktor yang memiliki tingkat kepentingan dan kekuatan tinggi diklasifikasikan sebagai pemain kunci. Aktor-aktor ini perlu dilibatkan secara aktif dan penuh, termasuk dalam proses evaluasi strategi baru.

  - a. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang
  - b. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang
  - c. BPBD Kota Malang
  - d. Pokdarwis Kampung Tridi dan Pokdarwis Kampung Jodipan
  - e. Ketua RT dan Ketua RW Kampung Tridi dan Kampung Jodipan
  - f. Bappeda Kota Malang
  - g. BBWS Brantas (Kementerian PUPR)
3. Pengikut (Kepentingan dan Kekuatan Rendah)
 

Aktor dengan tingkat kepentingan dan kekuatan rendah disebut sebagai pengikut. Untuk melibatkan mereka lebih jauh, perlu diperhatikan bahwa kepentingan dan pengaruh mereka dapat berubah seiring waktu. Oleh karena itu, aktor ini harus terus dipantau dan dijalin komunikasi yang baik.

  - a. Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang
  - b. BPDASHL Brantas (Kementerian Kehutanan)
  - c. Perguruan Tinggi
  - d. Sektor Swasta
  - e. Media
4. Pendukung (Kepentingan Rendah, Kekuatan Tinggi)
 

Aktor yang memiliki tingkat kepentingan rendah tetapi kekuatan tinggi dikategorikan sebagai pendukung. Keberadaan mereka bisa membawa risiko, sehingga perlu dilakukan pemantauan dan pengelolaan yang hati-hati. Mereka juga bisa berubah menjadi pemain kunci akibat suatu peristiwa, sehingga hubungan baik dengan stakeholder ini harus terus dipelihara. Tidak ada stakeholder yang secara eksklusif masuk dalam kategori ini. Namun, stakeholders kelembagaan pemerintah pusat dan media bisa juga memiliki peran pada pendukung.

### 3.6. Peran Stakeholders

Peran adalah aspek yang dinamis dari posisi seseorang; ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya, berarti ia telah menjalankan perannya (Handayani & Warsono, 2017). Identifikasi peran stakeholders dalam pengembangan kampung wisata warna-warni sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan dan aman bencana di Bantaran Sungai Brantas, Kota Malang adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Identifikasi Peran Stakeholders

No	Stakeholders	Peran
1	Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas – Kementerian Pekerjaan Umum	Berperan sebagai <b>policy creator</b> dan <b>koordinator</b> dalam pengelolaan sumber daya air di Sungai Brantas. Mereka menetapkan regulasi terkait pemanfaatan sempadan sungai dan pengendalian banjir, serta memberikan rekomendasi teknis terkait pembangunan di kawasan tersebut.
2	Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Brantas (BPDASHL) Brantas – Kementerian Kehutanan	Berperan sebagai <b>policy creator</b> dalam pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) Brantas. Mereka menetapkan regulasi terkait konservasi tanah dan air, serta rehabilitasi hutan dan lahan.
3	Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang	Berperan sebagai <b>implementor</b> dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kampung Warna-Warni. Mereka melakukan pemantauan kualitas lingkungan, pengelolaan sampah, dan pengendalian pencemaran.

No	Stakeholders	Peran
4	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang	Bertindak sebagai <b>koordinator</b> dan <b>fasilitator</b> utama dalam pengembangan pariwisata di Kampung Warna-Warni. Peran mereka meliputi perencanaan, promosi, dan pengembangan produk wisata.
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang	Berperan sebagai <b>implementor</b> dalam penataan ruang dan kawasan permukiman di Kampung Warna-Warni. Mereka bertanggung jawab dalam pembangunan dan perbaikan infrastruktur, serta penataan bangunan dan lingkungan.
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang	Berperan sebagai <b>koordinator</b> dan <b>implementor</b> dalam pengelolaan risiko bencana di Kampung Warna-Warni. Mereka bertanggung jawab dalam penyusunan rencana mitigasi bencana, pelatihan masyarakat, dan penanganan darurat bencana.
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang	Berperan sebagai <b>koordinator</b> dalam perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi. Mereka memastikan bahwa pengembangan Kampung Warna-Warni selaras dengan rencana pembangunan kota secara keseluruhan.
8	Dinas Kesehatan Kota Malang	Berperan sebagai <b>implementor</b> dalam program kesehatan masyarakat di Kampung Warna-Warni. Mereka memberikan layanan kesehatan, edukasi kesehatan, dan pengendalian penyakit.
9	UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang	Berperan sebagai <b>implementor</b> dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran di Kampung Warna-Warni. Mereka melakukan inspeksi keselamatan, pelatihan masyarakat, dan pemadaman kebakaran.
10	Kelurahan Jodipan dan Kelurahan Satriyan	Berperan sebagai <b>implementor</b> dalam program pemerintah di tingkat kelurahan. Mereka membantu dalam sosialisasi program, pendataan masyarakat, dan koordinasi kegiatan di lapangan.
11	Pokdarwis Kampung Tridi dan Pokdarwis Kampung Jodipan	Berperan sebagai <b>implementor</b> dan <b>akselerator</b> dalam pengelolaan pariwisata di tingkat lokal. Mereka bertanggung jawab dalam pengelolaan destinasi, penyediaan layanan wisata, dan pemberdayaan masyarakat.
12	Ketua RT dan Ketua RW Kampung Tridi dan Kampung Jodipan	Berperan sebagai <b>akselerator</b> dalam mobilisasi partisipasi masyarakat dalam pengembangan kampung wisata. Mereka mengorganisir kegiatan gotong royong, sosialisasi program, dan mediasi antara masyarakat dan <i>stakeholders</i> lain.
13	Perguruan Tinggi	Berperan sebagai <b>fasilitator</b> dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung pengembangan Kampung Warna-Warni. Mereka melakukan penelitian, pengabdian masyarakat, dan pengembangan inovasi.
14	Media	Berperan sebagai <b>akselerator</b> dalam promosi dan publikasi Kampung Warna-Warni. Mereka menyebarkan informasi tentang destinasi wisata, kegiatan masyarakat, dan program pemerintah.
15	Sektor Swasta	Berperan sebagai <b>akselerator</b> dalam pengembangan ekonomi di Kampung Warna-Warni. Mereka berinvestasi dalam pengembangan produk wisata, penyediaan layanan, dan promosi.

Sumber : Hasil Analisis, 2025

### 3.7. Relasi Kuasa Stakeholders

Aktor stakeholders dalam pengembangan kampung wisata warna-warni sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan dan aman bencana di Bantaran Sungai Brantas, Kota Malang saling melakukan interaksi dan kolaborasi kinerja secara asinergis menjadi kunci keberhasilan pengembangan kawasan kampung tersebut. Hubungan antara lembaga dan stakeholders terkait sangat berpengaruh dalam proses dan strategi yang diterapkan dalam sebuah kebijakan bersama (Madani, 2011 dalam Filia dan Alfidrus, 2020). Stakeholders dapat berupa individu maupun kelompok yang terlibat dalam diskusi dan perdebatan mengenai kebijakan publik. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa aktor memiliki peran penting dalam konteks kebijakan publik dan keberlanjutannya. Berikut adalah relasi kuasa antar stakeholders yang terlibat :

Tabel 3. Relasi Kuasa Stakeholders

Relasi Kuasa	BBWS Brantas	BPDAS Brantas	DLH Kota Malang	Dinkes Kota Malang	UPT Damkar Kota Malang	Kelurahan	Perguruan Tinggi
Disporapar Kota Malang	Konflikktual	Konflikktual	Konflikktual	Kolaborasi	Kolaborasi	Kolaborasi	Kolaborasi
DPUPRKP Kota Malang	Konflikktual	Konflikktual	Konflikktual	Kolaborasi	Kolaborasi	Kolaborasi	Kolaborasi
Bappeda Kota Malang	Kolaborasi	Kolaboraasi	Kolaborasi	Kolaborasi	Kolaborasi	Kolaborasi	Kolaborasi
BPBD Kota Malang	Konflikktual	Konflikktual	Konflikktual	Kolaborasi	Kolaborasi	Kolaborasi	Kolaborasi
Pokdarwis	Konflikktual	Konflikktual	Konflikktual	Kolaborasi	Konflikktual	Kolaborasi	Kolaborasi
Ketua RT dan Ketua RW	Konflikktual	Konflikktual	Konflikktual	Kolaborasi	Konflikktual	Kolaborasi	Kolaborasi

Sumber : Hasil Analisis, 2025

#### 1. Relasi Kooperatif / Kolaboratif

Relasi kooperatif atau kolaboratif dalam pengembangan kampung wisata melibatkan kerjasama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Dalam konteks ini, kolaborasi menjadi strategi penting untuk menciptakan daya tarik wisata yang unggul dan berdaya saing. Setiap aktor yang terlibat memiliki peran masing-masing dan saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama.

#### 2. Relasi Konflikktual

Relasi konflikktual dapat muncul ketika terdapat perbedaan kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan kampung wisata. Ketidakhahaman tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak juga seringkali menjadi pemicu konflik. Oleh karena itu, penting untuk mengelola konflik dengan baik melalui dialog terbuka dan mediasi untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

### 3.8. Dimensi Konflikktual Antar Stakeholders

Berdasarkan relasi antar stakeholder yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya, berikut adalah dimensi konflikktual antar stakeholder yang dapat terjadi :

#### 1) Konflik Kepentingan antara Pengembangan Pariwisata dan Regulasi Tata Ruang

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang memiliki kepentingan untuk mengembangkan Kampung Wisata Warna-Warni sebagai destinasi wisata unggulan dengan berbagai fasilitas pendukung. Di sisi lain, BBWS Brantas dan Dinas PUPR-Perkim memiliki kewenangan untuk menegakkan regulasi tata ruang dan pengelolaan sempadan sungai yang membatasi aktivitas di bantaran sungai sesuai Peraturan Pemerintah tentang Sungai.

Konflik kepentingan ini terlihat jelas dalam hal pembangunan infrastruktur pariwisata seperti deck pengamatan, jembatan selfie, dan area kuliner yang dibangun di area sempadan sungai yang sebenarnya memiliki fungsi lindung. BBWS Brantas, dengan tupoksinya dalam pengelolaan sumber daya air, cenderung membatasi aktivitas di sempadan sungai untuk menjaga fungsi hidrologis. Namun, Dinas Pariwisata dan Pokdarwis, dengan tupoksinya dalam pengembangan destinasi wisata, cenderung mendorong pembangunan fasilitas untuk meningkatkan daya tarik dan kenyamanan wisatawan.

#### 2) Konflik Prioritas antara Pengembangan Ekonomi dan Mitigasi Bencana

Pokdarwis dan masyarakat lokal memiliki prioritas pada pengembangan ekonomi melalui pariwisata yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Mereka cenderung fokus pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dan diversifikasi atraksi wisata. Di sisi lain, BPBD Kota Malang memiliki prioritas pada mitigasi bencana yang mungkin membatasi aktivitas ekonomi di area rawan bencana. BPBD menekankan pembatasan kapasitas pengunjung, pengaturan jam kunjungan terutama saat musim hujan, dan penyediaan jalur evakuasi yang memadai.

Konflik prioritas ini menjadi semakin kompleks ketika berhadapan dengan situasi di mana kebutuhan ekonomi masyarakat berbenturan dengan kebutuhan keamanan dari risiko bencana. Misalnya, pada musim hujan ketika risiko banjir meningkat, BPBD mungkin merekomendasikan pembatasan kunjungan wisatawan, sementara Pokdarwis dan pedagang lokal mungkin menolak karena akan berdampak pada pendapatan mereka.

### 3) Konflik Kewenangan dalam Pengelolaan Kawasan

BBWS Brantas sebagai lembaga vertikal Kementerian PUPR memiliki kewenangan dalam pengelolaan Sungai Brantas berdasarkan PP No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai. Di sisi lain, Pemerintah Kota Malang melalui Dinas PUPR-Perkim dan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata memiliki kewenangan dalam penataan ruang dan pengembangan pariwisata di wilayahnya berdasarkan Perda Kota Malang Nomor 6 Tahun 2022 tentang RTRW.

Konflik kewenangan ini dapat terlihat dari proses perizinan dan pengawasan aktivitas di bantaran Sungai Brantas. BBWS Brantas memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi teknis terhadap kegiatan di sempadan sungai, sementara Pemerintah Kota Malang memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin pemanfaatan ruang. Ketidakjelasan dalam koordinasi dapat menyebabkan tumpang tindih atau bahkan kontradiksi dalam kebijakan dan implementasi di lapangan.

## 3.9. Dimensi Kolaboratif Antar Stakeholders

Berdasarkan relasi antar stakeholder yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya, berikut adalah dimensi kolaborasi antar stakeholder yang dapat terjadi :

### [1]. Kolaborasi dalam Perencanaan Terpadu

Bappeda Kota Malang telah memfasilitasi kolaborasi antar lembaga dalam penyusunan rencana terpadu pengembangan Kampung Wisata Warna-Warni. Kolaborasi ini melibatkan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Dinas PUPR-Perkim, BPBD, BBWS Brantas, dan stakeholders lainnya. Melalui forum koordinasi perencanaan pembangunan daerah, berbagai perspektif dan kepentingan diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan yang komprehensif.

Kolaborasi dalam perencanaan terpadu ini telah menghasilkan integrasi aspek pariwisata, penataan ruang, dan kebencanaan dalam rencana pengembangan Kampung Wisata Warna-Warni. Misalnya, dalam perencanaan fasilitas wisata di bantaran sungai, aspek kebencanaan dipertimbangkan melalui desain bangunan yang adaptif terhadap banjir dan penyediaan jalur evakuasi.

### [2]. Kolaborasi dalam Pemberdayaan Masyarakat

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, BPBD, Pokdarwis, dan perguruan tinggi telah berkolaborasi dalam pemberdayaan masyarakat untuk pengelolaan destinasi wisata yang aman bencana. Kolaborasi ini terlihat dari adanya program pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas Pokdarwis dan masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata sekaligus kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Program pemberdayaan masyarakat ini mencakup pelatihan keterampilan pengelolaan destinasi wisata, pelatihan tanggap darurat bencana, dan pendampingan pengembangan produk wisata yang ramah lingkungan. Universitas Muhammadiyah Malang yang menjadi inisiator Kampung Warna-Warni melalui Tim GuysPro terus berkolaborasi dengan Pokdarwis dalam pengembangan inovasi atraksi wisata.

### [3]. Kolaborasi dalam Edukasi Kebencanaan

BPBD Kota Malang, UPT Pemadam Kebakaran, Dinas Kesehatan, dan Pokdarwis telah berkolaborasi dalam edukasi kebencanaan bagi masyarakat dan wisatawan. Kolaborasi ini terlihat dari adanya program sosialisasi dan simulasi tanggap darurat di Kampung Wisata Warna-Warni. Program edukasi kebencanaan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan wisatawan terhadap risiko bencana dan langkah-langkah yang harus diambil saat terjadi bencana.

Edukasi kebencanaan ini juga diintegrasikan ke dalam atraksi wisata melalui pengembangan wisata edukasi kebencanaan. Wisatawan tidak hanya menikmati keindahan visual Kampung Warna-Warni, tetapi juga mendapatkan pengetahuan tentang risiko bencana dan upaya mitigasinya. Integrasi edukasi kebencanaan ke dalam atraksi wisata ini menjadi contoh kolaborasi yang efektif antara BPBD dan Dinas Pariwisata

### 3.10. Integrasi Tupoksi dengan Hubungan Konfliktual-Kolaboratif

Integrasi antara tupoksi dengan hubungan konfliktual-kolaboratif antar lembaga menjadi aspek penting dalam pengembangan Kampung Wisata Warna-Warni yang aman bencana. Analisis integrasi ini membantu memahami bagaimana tupoksi masing-masing lembaga berpotensi menciptakan konflik atau mendorong kolaborasi.

#### 1. Overlapping Kewenangan dan Potensi Konflik

##### a. Tumpang Tindih Kewenangan dalam Penataan Ruang Bantaran Sungai

BBWS Brantas dengan tupoksinya dalam pengelolaan sempadan sungai dan Dinas PUPR-Perkim dengan tupoksinya dalam penataan ruang memiliki kewenangan yang tumpang tindih dalam penataan kawasan bantaran Sungai Brantas. BBWS Brantas berdasarkan PP No. 38/2011 memiliki wewenang menetapkan garis sempadan sungai dan mengatur aktivitas yang diperbolehkan di sempadan sungai. Di sisi lain, Dinas PUPR-Perkim berdasarkan Perda RTRW memiliki wewenang menetapkan zonasi dan perizinan pemanfaatan ruang.

Tumpang tindih kewenangan ini berpotensi menimbulkan konflik interpretasi terhadap batas sempadan sungai dan regulasi pemanfaatan ruang di sempadan sungai. Misalnya, BBWS Brantas mungkin menetapkan garis sempadan yang lebih luas untuk kepentingan pengendalian banjir, sementara Dinas PUPR-Perkim mungkin menetapkan zonasi yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi kebutuhan pengembangan kawasan.

Konflik ini semakin kompleks dengan masuknya Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yang memiliki tupoksi dalam pengembangan destinasi wisata. Dinas Pariwisata cenderung mendorong pemanfaatan bantaran sungai untuk atraksi dan fasilitas wisata, yang mungkin bertentangan dengan fungsi lindung sempadan sungai yang ditekankan oleh BBWS Brantas.

##### b. Tumpang Tindih Kewenangan dalam Pengelolaan Risiko Bencana

BPBD Kota Malang dengan tupoksinya dalam penanggulangan bencana dan Dinas PUPR-Perkim dengan tupoksinya dalam pembangunan infrastruktur memiliki kewenangan yang tumpang tindih dalam pengelolaan risiko bencana. BPBD fokus pada aspek non-struktural seperti peningkatan

kapasitas dan sistem peringatan dini, sementara Dinas PUPR-Perkim fokus pada aspek struktural seperti pembangunan tanggul dan drainase.

Tumpang tindih kewenangan ini berpotensi menimbulkan konflik pendekatan dalam pengelolaan risiko bencana. BPBD mungkin menekankan pentingnya relokasi bangunan dari zona rawan bencana, sementara Dinas PUPR-Perkim mungkin lebih memilih pendekatan mitigasi struktural yang memungkinkan bangunan tetap berada di tempat dengan perlindungan infrastruktur yang memadai.

Konflik ini juga melibatkan Pokdarwis dan masyarakat yang mungkin memiliki perspektif berbeda mengenai risiko bencana dan upaya mitigasinya. Masyarakat mungkin menolak relokasi atau pembatasan aktivitas karena alasan ekonomi, sementara BPBD dan Dinas PUPR-Perkim menekankan keamanan dari risiko bencana.

## 2. Sinergi Tupoksi dan Peluang Kolaborasi

### a. Sinergi dalam Perencanaan Terpadu

Bappeda Kota Malang dengan tupoksinya dalam koordinasi perencanaan pembangunan, BBWS Brantas dengan tupoksinya dalam pengelolaan sumber daya air, BPBD dengan tupoksinya dalam penanggulangan bencana, dan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dengan tupoksinya dalam pengembangan destinasi wisata memiliki potensi sinergi dalam perencanaan terpadu. Sinergi ini dapat diwujudkan melalui penyusunan rencana induk pengembangan Kampung Wisata Warna-Warni yang mengintegrasikan aspek pariwisata, pengelolaan sungai, dan kebencanaan.

Bappeda berperan sebagai koordinator yang memfasilitasi dialog antar lembaga dan mengintegrasikan berbagai perspektif ke dalam dokumen perencanaan yang komprehensif. BBWS Brantas memberikan input teknis terkait pengelolaan sungai dan batas sempadan. BPBD memberikan input teknis terkait risiko bencana dan upaya mitigasinya. Dinas Pariwisata memberikan input teknis terkait pengembangan destinasi wisata. Integrasi berbagai input teknis ini menghasilkan perencanaan yang lebih holistik dan berkelanjutan.

### b. Sinergi dalam Pemberdayaan Masyarakat

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dengan tupoksinya dalam pembinaan pokdarwis, BPBD dengan tupoksinya dalam peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana, dan perguruan tinggi dengan tupoksinya dalam pengabdian masyarakat memiliki potensi sinergi dalam pemberdayaan masyarakat. Sinergi ini dapat diwujudkan melalui program pemberdayaan masyarakat terpadu yang mengintegrasikan aspek pengelolaan destinasi wisata dan kesiapsiagaan bencana.

Dinas Pariwisata berperan dalam pelatihan keterampilan pengelolaan destinasi wisata. BPBD berperan dalam pelatihan kesiapsiagaan bencana. Perguruan tinggi berperan dalam pendampingan dan inovasi. Integrasi berbagai program pemberdayaan ini menghasilkan masyarakat yang tidak hanya mampu mengelola destinasi wisata dengan baik, tetapi juga siap menghadapi bencana.

### c. Sinergi dalam Edukasi dan Promosi

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dengan tupoksinya dalam promosi wisata, BPBD dengan tupoksinya dalam edukasi kebencanaan, dan media dengan perannya dalam penyebaran informasi memiliki potensi sinergi dalam edukasi dan promosi. Sinergi ini dapat diwujudkan melalui kampanye terpadu yang mengedukasi masyarakat dan wisatawan tentang Kampung Wisata Warna-Warni sebagai destinasi wisata yang aman bencana.



Dinas Pariwisata berperan dalam promosi Kampung Wisata Warna-Warni sebagai destinasi wisata unggulan. BPBD berperan dalam edukasi tentang risiko bencana dan langkah-langkah yang harus diambil saat terjadi bencana. Media berperan dalam menyebarkan informasi tentang Kampung Wisata Warna-Warni sebagai destinasi wisata yang aman bencana. Integrasi edukasi kebencanaan ke dalam promosi wisata ini menciptakan kesadaran yang lebih tinggi terhadap risiko bencana tanpa mengurangi daya tarik destinasi wisata.

### 3.11. Strategi Meminimalisir Konflik dan Penguatan Kolaborasi Antar Lembaga

Untuk mewujudkan pengembangan Kampung Wisata Warna-Warni yang aman bencana dan berkelanjutan, diperlukan strategi komprehensif yang berfokus pada:

#### (1) Meminimalisir Konflik Antar Lembaga:

- (a) Pengembangan Mekanisme Koordinasi Lintas Sektor: Pembentukan forum koordinasi yang melibatkan seluruh stakeholders kunci untuk membahas isu strategis dan menyelesaikan konflik kepentingan.
- (b) Penyusunan Kesepakatan Bersama (MoU): Memperjelas peran, tanggung jawab, dan mekanisme koordinasi antar lembaga melalui MoU yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi.
- (c) Harmonisasi Regulasi dan Kebijakan: Menyelaraskan regulasi terkait penataan ruang, pengelolaan sungai, pariwisata, dan kebencanaan untuk menghindari konflik interpretasi.

#### (2) Penguatan Kolaborasi Antar Lembaga:

- (a) Pengembangan Program Kolaboratif Terpadu: Merancang dan mengimplementasikan program yang mengintegrasikan aspek pariwisata, penataan ruang, pengelolaan sungai, dan kebencanaan. Contohnya, wisata edukasi kebencanaan, konservasi sungai berbasis masyarakat, dan ekonomi kreatif aman bencana.
- (b) Penguatan Kapasitas Stakeholders: Meningkatkan pemahaman dan keterampilan kolaborasi melalui pelatihan, workshop, dan studi banding.
- (c) Pengembangan Sistem Informasi Terpadu: Membangun platform untuk berbagi data dan informasi antar lembaga, meningkatkan transparansi, dan memfasilitasi koordinasi.
- (d) Pelembagaan Mekanisme Insentif dan Penghargaan: Memberikan pengakuan dan apresiasi terhadap upaya kolaborasi yang sukses untuk mendorong keberlanjutan dan replikasi.

#### (3) Penguatan Sinergi Pentahelix dalam Strategi Kolaboratif

Strategi pengembangan kawasan tidak dapat berjalan parsial. Berdasarkan pemetaan sebelumnya, optimalisasi model Pentahelix dilakukan melalui pembagian peran strategis:

- (a) Government (Pemerintah) sebagai Leading Sector: Dinas Pariwisata dan BBWS Brantas harus membentuk Gugus Tugas Gabungan (Joint Task Force) untuk menyelaraskan regulasi pariwisata dan sempadan sungai. Hal ini untuk mengatasi konflik kewenangan yang teridentifikasi.
- (b) Academic (Akademisi) sebagai Konseptor Mitigasi: Pelibatan perguruan tinggi tidak hanya sebatas KKN, namun diarahkan pada penyusunan kajian risiko bencana ("risk assessment") berkala yang menjadi dasar bagi Pokdarwis dalam mengelola pengunjung.
- (c) Community (Komunitas) sebagai Garda Depan: Pokdarwis dan RT/RW diberikan peran lebih besar dalam pengawasan debit air sungai ("early warning system") berbasis kearifan lokal yang didampingi oleh BPBD.
- (d) Media & Business sebagai Pendukung: Media diarahkan untuk edukasi "wisata aman bencana", bukan sekadar promosi visual. Sementara sektor swasta (CSR) diarahkan untuk mendanai infrastruktur keselamatan (pagar pembatas, rambu evakuasi) yang tidak tercover APBD.

#### 4. Kesimpulan

Pengembangan Kampung Wisata Warna-Warni yang aman bencana di Bantaran Sungai Brantas Kota Malang memerlukan pendekatan terpadu yang melibatkan berbagai stakeholders dengan tupoksi, kepentingan, dan perspektif yang berbeda. Analisis terhadap tupoksi lembaga, hierarki stakeholders, kondisi konfliktual dan kolaboratif antar lembaga, serta integrasi tupoksi dengan hubungan tersebut memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kompleksitas pengelolaan kawasan ini. Strategi untuk meminimalisir konflik antar lembaga memerlukan pengembangan mekanisme koordinasi lintas sektor, penyusunan kesepakatan bersama, dan harmonisasi regulasi dan kebijakan. Strategi untuk memperkuat kolaborasi antar lembaga memerlukan pengembangan program kolaboratif terpadu, penguatan kapasitas stakeholders, pengembangan sistem informasi terpadu, dan pelembagaan mekanisme insentif dan penghargaan.

Implementasi strategi tersebut memerlukan komitmen politik yang kuat, dukungan sumber daya yang memadai, dan partisipasi aktif dari semua stakeholders. Pendekatan adaptif dan pembelajaran kolektif perlu diterapkan dalam proses implementasi, sehingga memungkinkan adaptasi terhadap perubahan konteks dan pembelajaran dari pengalaman implementasi. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan kolaboratif, Kampung Wisata Warna-Warni dapat berkembang menjadi destinasi wisata yang tidak hanya menarik dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga aman dari risiko bencana dan berkelanjutan dari aspek lingkungan, sosial, dan budaya. Pengembangan ini menjadi model yang dapat direplikasi untuk kawasan serupa di Indonesia, khususnya dalam transformasi kawasan kumuh menjadi destinasi wisata yang aman bencana.

#### Ucapan Terima Kasih

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian penelitian ini. Terutama kepada :

1. Program Studi Magister Manajemen Bencana, Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga yang memberikan dukungan dan fasilitasi untuk kegiatan penelitian untuk Tugas Akhir Thesis ;
2. Pemerintah Pusat melalui Pusat Layanan Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI yang memberikan dukungan dalam pembiayaan pendidikan melalui Beasiswa Unggulan Masyarakat Berprestasi Tahun 2024 ;
3. Pemerintah Kota Malang dan OPD di Kota Malang yang memberikan izin dan dukungan baik data dan informasi yang diperlukan oleh tim peneliti untuk melakukan penelitian ;
4. Pemerintah dan Masyarakat Kelurahan Jodipan dan Kelurahan Satriyan yang memberikan izin dan dukungan serta kemudahan selama melakukan kegiatan penelitian ;

#### Daftar Pustaka

- Akbar, T. (2018). Kampung tematik sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam permasalahan permukiman kumuh di Kota Malang. *WAHANA*, 70(2), 37–48.
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Jurnal Edumaspul*, 6(1), 974-980.
- BPS Kota Malang. (2024). Kota Malang dalam angka 2024. <https://malangkota.bps.go.id/publication.html>
- Choirunnisa, I. C., & Karmilah, M. (2022). Strategi pengembangan pariwisata budaya. *Jurnal Kajian Ruang*, 2(1), 89–109.
- Chrismawati, Y., & Pramono, R. W. D. (2021). Pemetaan stakeholder yang berperan dalam pengembangan agrowisata Minapadi Samberembe. *Jurnal Riset Pembangunan*, 4(1), 26–46.
- Destiana, R., Kismartini, K., & Yuningsih, T. (2020). Analisis peran stakeholders dalam pengembangan destinasi pariwisata halal di Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 8(2), 132–153.
- Filia, P. G., & Alfirdaus, L. K. (2020). Analisis stakeholder dalam program CSR-BUMN: Balkondes (Balai Ekonomi Desa) Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. *Journal of Politic and Government Studies*, 9(03), 1–10.
- Handayani, F., & Warsono, H. (2017). Analisis peran stakeholders dalam pengembangan objek wisata Pantai Karang Jahe di Kabupaten Rembang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 6(3), 40–53. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v6i3.16543>
- Kelvin, K., Widianingsih, I., & Buchari, R. A. (2022). Kolaborasi Model Penta Helix Dalam Mewujudkan Smart Village Pondok Ranji. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 1-15.

- Khater, M., Ibrahim, O., Sayed, M. N. E., & Faik, M. (2024). Legal frameworks for sustainable tourism: Balancing environmental conservation and economic development. *Current Issues in Tourism*, 1-22.
- Kusumawardhani, W. A., Rachmawati, T. A., & Sutikno, F. R. (2022). Keberlanjutan aset penghidupan kampung tematik terkait program pengentasan kemiskinan pada permukiman kumuh. *Planning for Urban Region and Environment (PURE)*, 11(2), 183–192.
- Lindawati, S., & Hendri, M. (2016). Penggunaan metode deskriptif kualitatif untuk analisis strategi pengembangan kepariwisataan Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara. Dalam Seminar Nasional APTIKOM (SEMNASTIKOM), Hotel Lombok Raya Mataram (hlm. 833–837).
- Maulana, M., Baihaqi, K., & Amin, S. (2024). Dampak adanya Kampung Warna-Warni Jodipan Kota Malang bagi perubahan sosial dan dinamika masyarakat. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 2(6), 1348–1355.
- Masrurun, Z. Z., & Nastiti, D. M. (2023). Analisis stakeholders dalam pengembangan kawasan strategis pariwisata Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Kepariwisata Indonesia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kepariwisata Indonesia*, 17(1), 99–118.
- Monnapula-Mapesela, M. (2024). Enabling and constraining causal powers for research and innovation in the South African Higher Education. *South African Journal of Higher Education*, 38(2), 217-235.
- Napitupulu, F. S. (2020). Peran stakeholders dalam pengentasan kemiskinan kelompok nelayan di Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang. *E-Journal Undip*, 5–6.
- Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2022–2042. Pemerintah Kota Malang. (2022).
- Riyanto, D. N. A. R., & Alfirdaus, L. K. (2024). Tantangan Dan Hambatan Collaborative Governance Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Kebumen (Studi Kawasan Geopark Kebumen). *Journal of Politic and Government Studies*, 14(1), 374-391.
- Rohman, F., & Fitriana, K. N. (2024). Stakeholder analysis dalam pengembangan sustainable tourism di Pantai Glagah Kabupaten Kulon Progo. *Journal of Public Policy and Administration Research*, 9(1), 15.
- Samani, S. P. N., Khani, N., Bahrami, M., & Sharifabadi, A. M. (2023). Providing a framework for adopting a circular supply chain with the approach of stakeholder analysis and interpretive structural modelling (Case Study: Steel Industry). *Journal of Organisational Studies & Innovation*, 10(3).
- Sandy, O. F. (2020). Analisis peran aktor dalam implementasi kebijakan pembangunan sanitasi di Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 6(3), 415–422.
- Sartika, S., & Yogopriyatno, J. (2024, October). Stakeholder Mapping dalam Formulasi Kebijakan Tentang Pengelolaan Persampahan di Kota Lubuklinggau. In *Iapa Proceedings Conference* (pp. 375-387).
- Topandean, F. (2022). Perubahan sosial masyarakat Joidpan setelah ditetapkan sebagai Kampung Wisata Warna-Warni Malang, Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Pariwisata dan Bisnis*, 1(12), 3674–3683.
- Turnip, D. S., Hasyim, A. W., & Parlindungan, J. (2022). Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan sungai (Studi Kasus: Sempadan Sungai Brantas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang). *Planning for Urban Region and Environment (PURE)*, 11(3), 37–46.
- Wakka, A. K. (2014). Analisis stakeholders pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea*, 3(1), 47–55.
- Zubaidah, S., & Kurniawan, I. A. (2022). Pertumbuhan perkampungan kumuh di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi (JIIA)*, 12(2), 74–85.